

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Produktivitas Pertanian Rendah
 - 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didorong Sektor Investasi
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Kualitas Belanja Daerah
 - 3.7 Daya Dukung Lingkungan Berkurang
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Aceh 2014

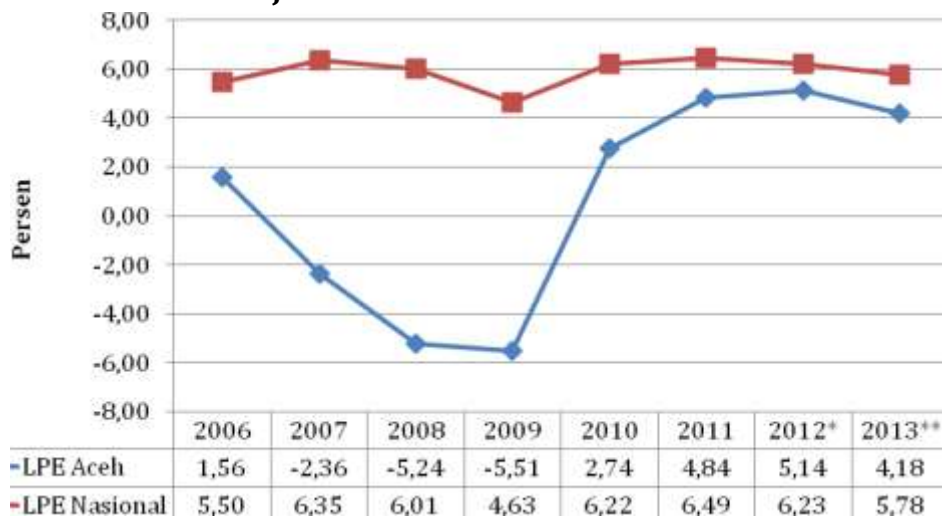
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian wilayah dan nasional, baik sebagai kawasan strategis perbatasan, salah satu lumbung energi nasional, maupun penghasil komoditas ekspor unggulan nasional. Perekonomian Aceh hanya memiliki pangsa 1,43 persen terhadap total output nasional (total PDRB 33 provinsi). Selama periode 2006-2013, laju pertumbuhan ekonomi Aceh selalu di bawah laju pertumbuhan nasional, bahkan mengalami pertumbuhan negatif dalam beberapa tahun. Hal ini dikarenakan menurunnya peran sektor migas. Jika menggunakan pertumbuhan PDRB tanpa migas, perekonomian Provinsi Aceh bertumbuh cukup baik. Secara rata-rata, dalam periode 2006-2013 perekonomian daerah (dengan migas) tumbuh dengan laju 0,67 persen per tahun, masih lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan 33 provinsi sebesar 5,9 persen per tahun (Gambar 1).

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

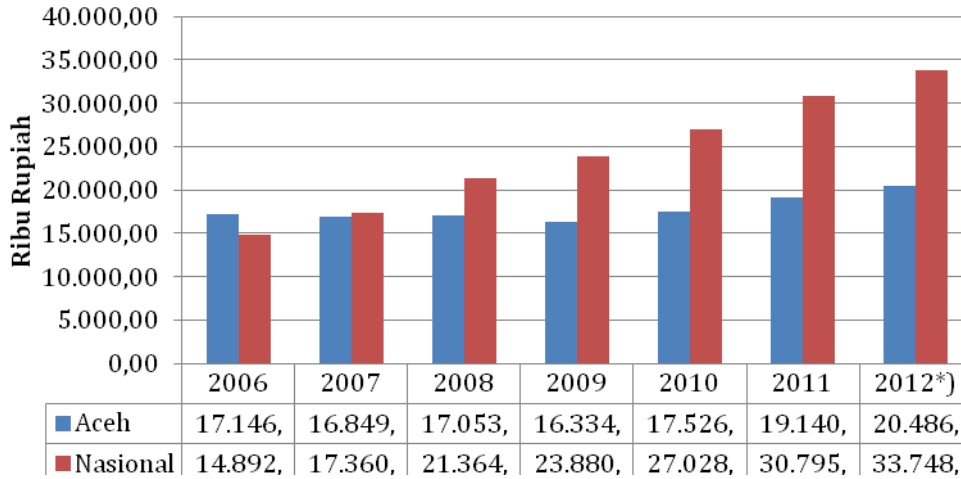


Sumber: BPS, 2013

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. Dalam hal ini PDRB per kapita tanpa migas dapat dianggap sebagai proxy pendapatan masyarakat daerah. Secara riil PDRB per kapita tanpa migas bertumbuh pada laju rata-rata 2,9 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Tantangan yang dihadapi Aceh adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar ketertinggalannya dari rata-rata daerah lain. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Aceh dan PDB

perkapita nasional adalah sebesar 115,14 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 60,70 persen (Gambar 2).

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

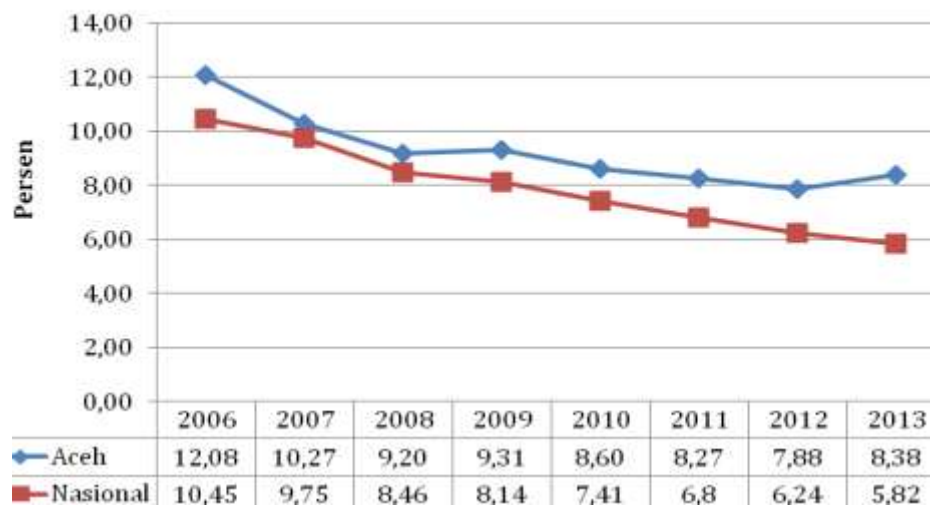


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Indikator lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi daerah diiringi dengan kecenderungan penurunan tingkat pengangguran. Meskipun demikian, terlihat pelambatan laju penurunan pengangguran sejak tahun 2008 (Gambar 3). Secara keseluruhan tingkat pengangguran Aceh masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

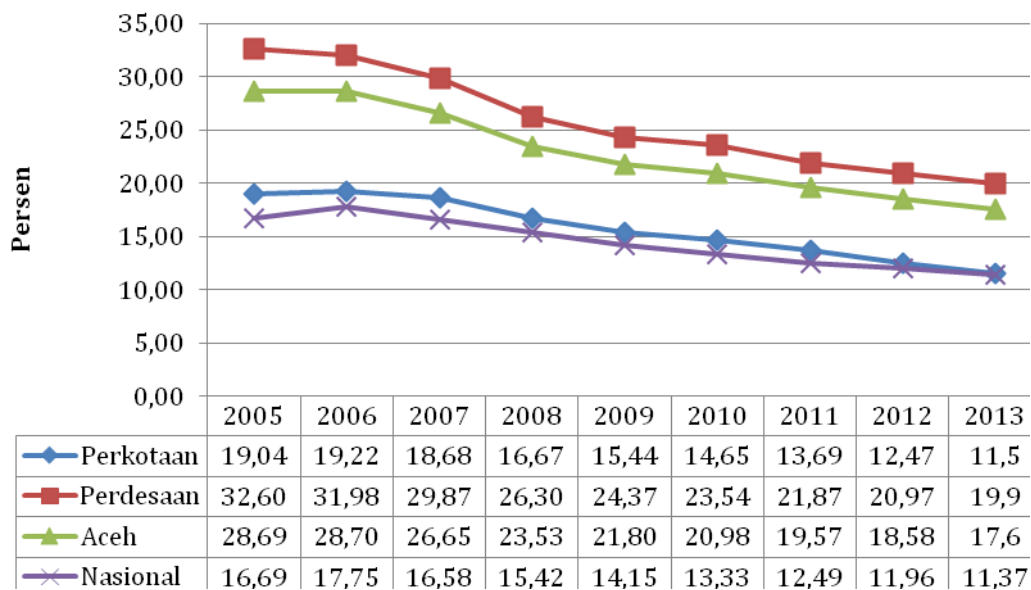


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran pada akhirnya diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Persentase penduduk miskin cenderung menurun sejak tahun 2006. Selama kurun waktu 2006-2013 kemiskinan di Aceh berkurang sebesar 11,1 persen (Gambar 4). Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di nasional sudah mencapai 11,37 persen, namun tingkat kemiskinan di Aceh masih sebesar 17,60 persen dengan 19,9 persen kemiskinan berada di perdesaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan karena kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, maupun infrastruktur lain yang menyebabkan rendahnya pendidikan di perdesaan. Keterbatasan infrastruktur di perdesaan juga menyebabkan rendahnya minat investor untuk berinvestasi di perdesaan sehingga memaksa penduduk desa menggantungkan hidupnya pada pertanian yang kurang berkembang.

B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seringkali dipahami sebagai peningkatan nilai tambah yang diikuti oleh perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2010 adalah sebagai

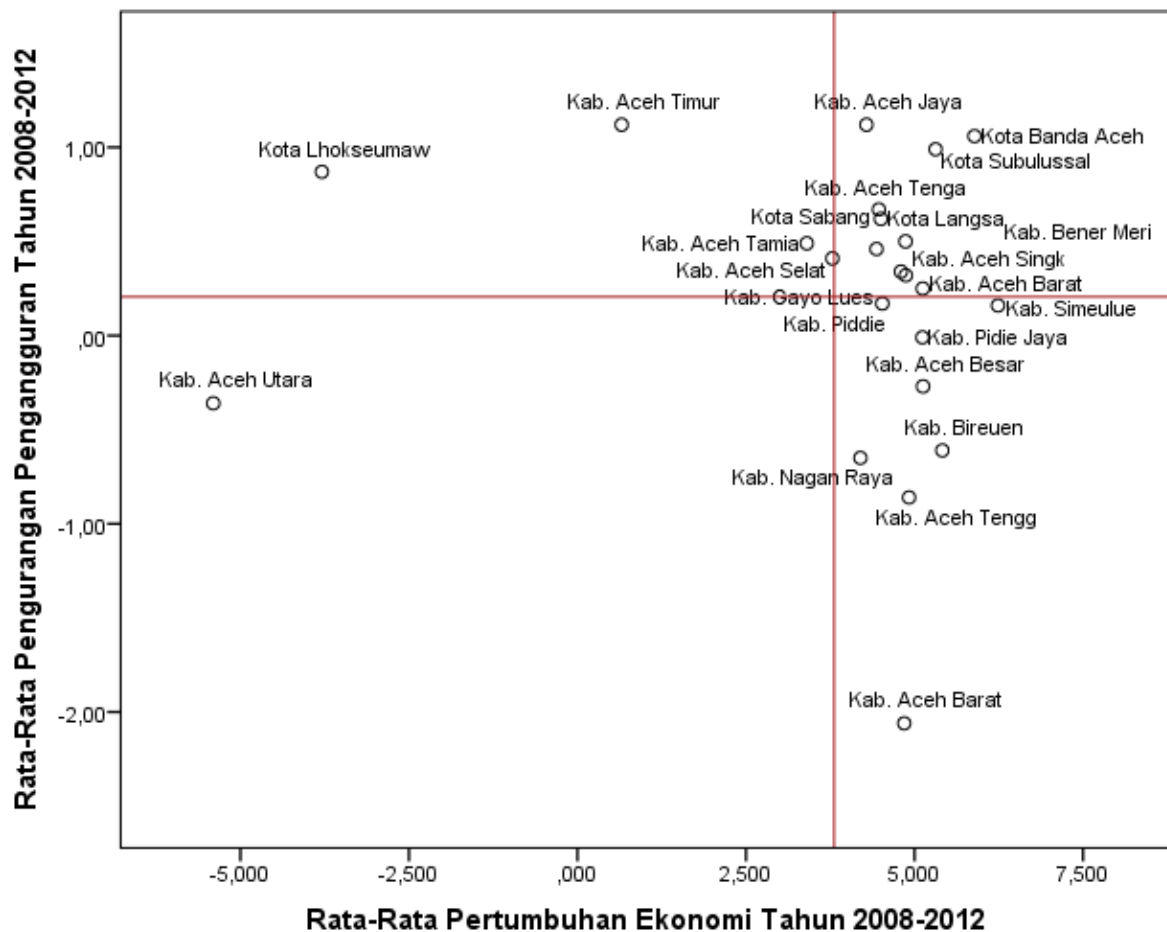
berikut (lihat Gambar 5). *Pertama*, Kabupaten Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Tenga, Aceh Singli, Aceh Barat, Bener Meri, Kota Subulussal, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Sabang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Selat, dan Kota Lhokseumawe yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Aceh Utara yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Gayo Lues, Pidie, Simeulue, Pidie Jaya, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tenggara, Nagan raya, dan Aceh Barat terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengurangan Jumlah Pengangguran
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

S

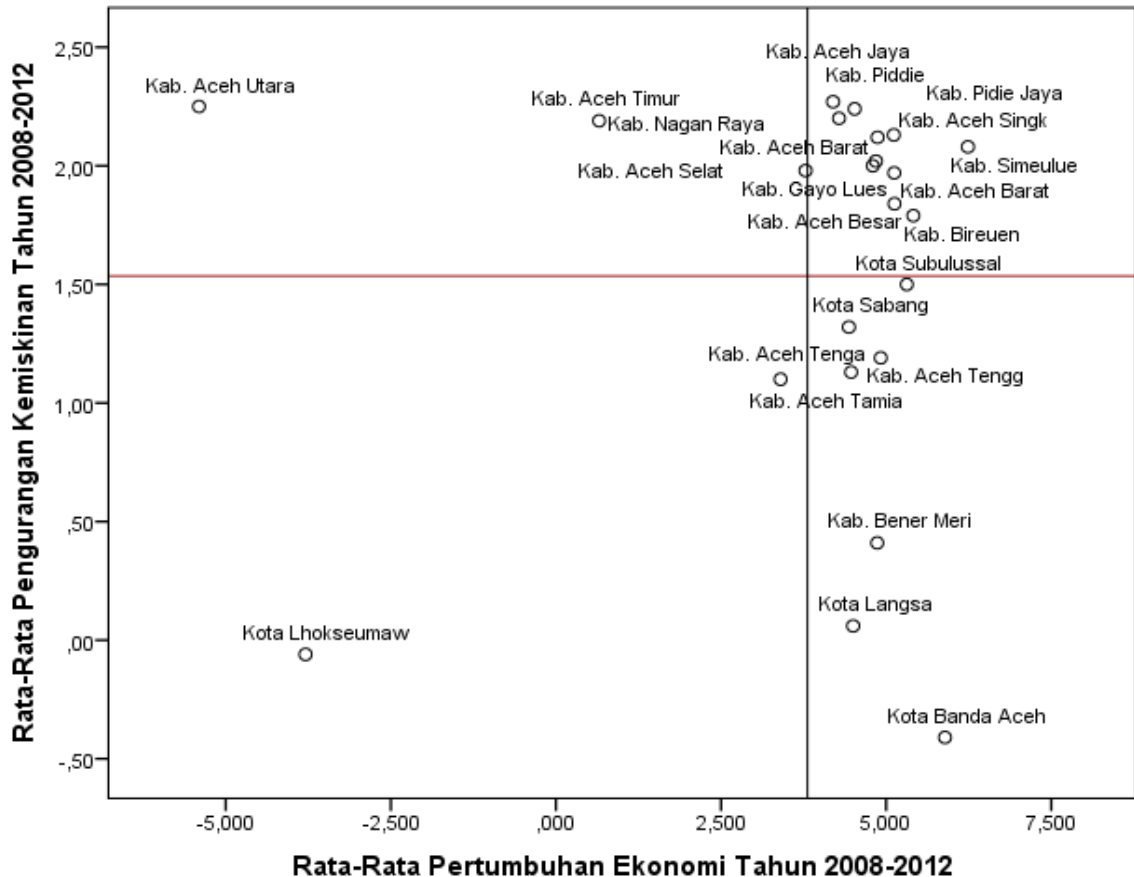
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6, menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama* Kabupaten Aceh Jaya, Pidie, pidie Jaya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Besar, Bireuen, dan Kota Subulussal termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, kabupaten Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Nagan raya, Aceh Selat terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan

mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengurangan
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhoksumawe terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meri, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Banda Aceh terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan

ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

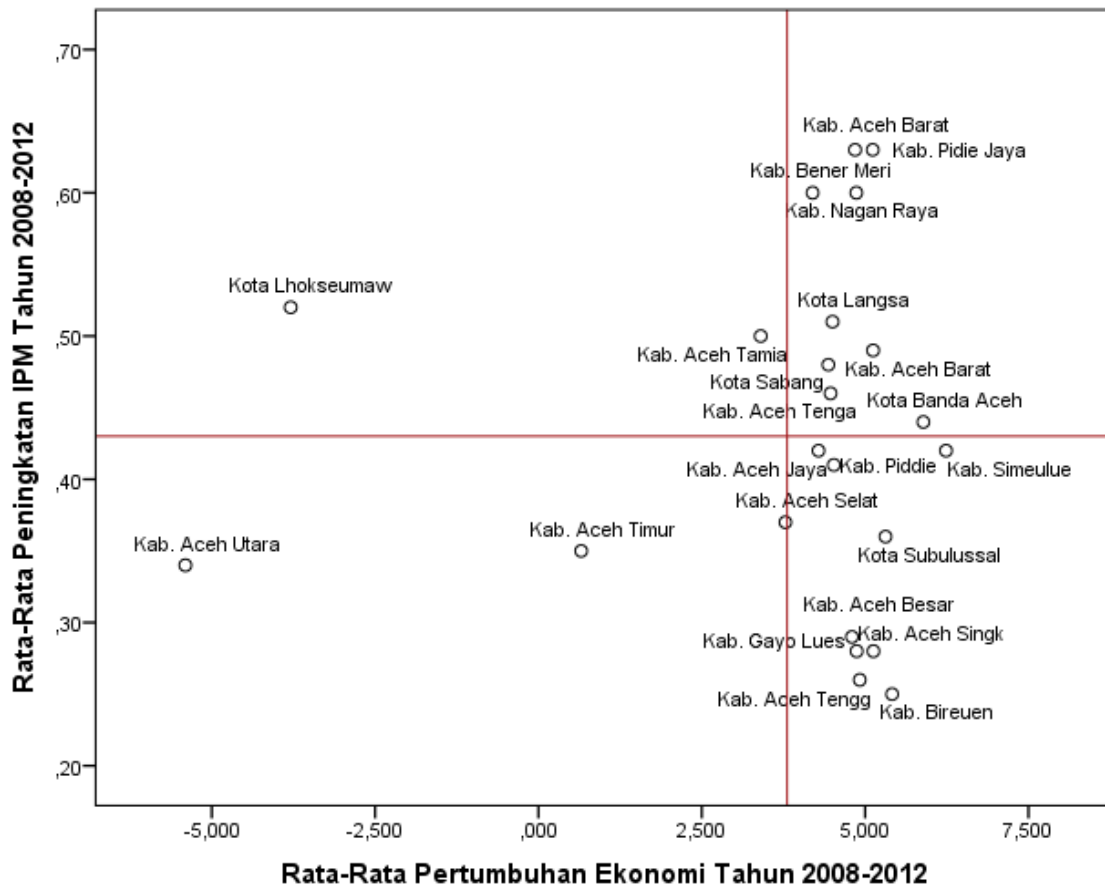
Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Aceh menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Aceh Barat, Pidie Jaya, Bener Meri, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Lhoksumawe yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Aceh Jaya, Pidie, Simeulue, Aceh Selat, Aceh Besar, Aceh Singkil, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Bireuen, dan Kota Subulussal terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Aceh yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Aceh masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin menurun. Kesenjangan ekonomi di Aceh dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapkan Provinsi Aceh pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Aceh terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Besarnya pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Aceh memiliki besaran yang hampir sama karena kesamaan struktur perekonomian di wilayah ini, yaitu pada sektor pertanian. Kota Lhoksumawe memiliki nilai PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Aceh, dan jauh meninggalkan kota dan kabupaten lainnya. Ketersediaan infrastruktur perkotaan turut mendukung tingginya PDRB perkapita di daerah ini

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
di Provinsi Aceh Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Aceh 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Simeulue	4.718	5.394	6.022	6.749	7.343	8.087
Aceh Singkil	5.557	5.972	6.430	6.997	7.768	8.468
Aceh Selatan	9.231	10.359	11.067	11.905	13.099	14.362
Aceh Tenggara	6.504	6.946	7.580	8.307	9.092	10.034
Aceh Timur	19.462	21.620	17.490	18.539	19.202	19.843
Aceh Tengah	11.898	12.732	13.934	15.241	16.799	18.264
Aceh Barat	12.898	14.696	15.967	17.256	18.443	19.173
Aceh Besar	12.078	13.399	14.848	16.275	17.747	18.682
Pidie	7.460	8.467	9.531	10.739	12.107	13.744
Bireuen	10.307	11.985	13.709	14.780	16.343	17.628
Aceh Utara	22.853	26.357	21.301	21.123	21.603	22.410
Aceh Barat Daya	8.178	9.391	10.588	11.761	13.020	14.190
Gayo Lues	7.953	9.095	9.922	10.731	11.372	12.016
Aceh Tamiang	7.840	8.484	8.572	9.213	9.713	10.397
Nagan Raya	14.639	16.712	17.382	18.150	19.382	20.551
Aceh Jaya	8.341	9.647	10.914	12.489	13.779	14.372
Bener Meriah	10.173	11.437	12.981	14.503	15.877	16.996
Pidie Jaya	7.061	7.820	8.554	9.253	10.172	11.157
Kota Banda Aceh	22.233	26.157	30.343	34.558	39.342	43.384
Kota Sabang	12.931	14.281	15.785	17.150	18.060	19.229
Kota Langsa	8.587	9.883	11.173	12.214	12.934	13.737
Kota Lhokseumawe	59.483	62.281	61.303	60.229	60.336	59.353
Kota Subussalam	4.155	4.502	4.893	5.255	5.764	6.274
ACEH	16.849	17.053	16.335	17.526	19.141	20.486

Sumber: BPS, 2013

C. Analisa Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sektor Pertanian

Struktur perekonomian daerah secara sektoral masih didominasi oleh besarnya peran sektor pertanian. Di samping sektor pertanian, sektor-sektor tersier seperti perdagangan, dan jasa-jasa juga memiliki peran cukup besar, diikuti oleh sektor pertambangan. Pembentukan nilai tambah melalui industri pengolahan relatif belum berkembang. Selama tahun 2013 struktur perekonomian Aceh didominasi oleh pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa (Tabel 2). Besarnya peran sektor pertanian juga tampak pada penyerapan tenaga kerja daerah. Sekitar separuh tenaga kerja masih menggantungkan hidup di sektor ini, meskipun sedikit menyusut dalam lima tahun terakhir. Penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian ini bisa menghambat upaya penurunan kemiskinan jika tanpa diiringi dengan peningkatan produktivitas. Di samping itu, jika luas lahan pertanian tidak bertambah, peningkatan pekerja pertanian juga berarti menurunnya skala usaha yang bisa membuat produktivitas semakin menurun.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	27,22	26,87
2.	Pertambangan	9,56	6,65
3.	Industri Pengolahan	8,10	9,12
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,52	0,39
5.	Konstruksi	11,67	7,55
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	17,66	21,33
7.	Angkutan, Telekomunikasi	10,84	7,49
8.	Keuangan	3,07	2,00
9.	Jasa-jasa	11,35	18,59
Total PDRB		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Selama periode 2010-2014, pembukaan kesempatan kerja banyak terjadi di sektor-sektor tersier seperti jasa dan perdagangan (Tabel 3). Dalam perspektif transformasi struktural, kondisi ini berarti lompatan dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa karena tidak berkembangnya industri manufaktur. Biasanya fenomena ini diiringi dengan rendahnya produktivitas sektor jasa.

Tabel 3
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2010 -2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	869.110	955.595	86.485
2	Pertambangan	12.483	6.078	-6.405
3	Industri Pengolahan	75.827	117.161	41.334
4	Listrik, Gas, Air	3.917	9.039	5.122
5	Bangunan	96.185	139.166	42.981
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	271.815	330.625	58.810
7	Angkutan & Telekomunikasi	72.597	62.057	-10.540
8	Keuangan	9.644	25.147	15.503
9	Jasa-Jasa	355.092	381.866	26.774
Total		1.766.670	2026734	260.064

Sumber: BPS, 2014

Ketergantungan pada komoditas primer paling tidak memiliki dua risiko. Pertama, harga komoditas primer cenderung bergejolak (*volatile*) dalam beberapa tahun ini. Tidak stabilnya harga ini lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan produsen, khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan. Ketika harga komoditas naik, keuntungan terbesar biasanya dinikmati oleh pedagang perantara. Sementara ketika harga komoditas jatuh, beban terbesar ditanggung oleh petani. Kedua, permintaan terhadap komoditas pertanian khususnya pangan relatif inelastis, dan sebaliknya pada produk manufaktur. Ketika saat ini kawasan Asia termasuk Indonesia tengah tumbuh relatif tinggi dan menciptakan banyak warga kelas menengah baru, permintaan terhadap bahan pangan tidak akan naik secara proporsional dengan peningkatan pendapatan. Umumnya peningkatan pendapatan akan mendorong konsumsi barang-barang non pangan, seperti produk elektronik, perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Oleh karenanya, perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor primer khususnya pertanian berisiko terjebak pada pertumbuhan lambat atau sedang.

Tabel 4
Nilai LQ Sektor Ekonomi Aceh 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,76	1,93	2,03	1,98	2,15
a. Tanaman Bahan Makanan	1,39	1,52	1,66	1,67	1,84
b. Tanaman Perkebunan	2,23	2,52	2,59	2,48	2,62
c. Peternakan	2,46	2,67	2,74	2,63	2,91
d. Kehutanan	2,02	2,08	2,10	2,10	2,35
e. Perikanan	1,83	2,01	2,03	1,88	1,96
2. Pertambangan dan Penggalian	1,88	1,05	0,98	0,92	0,96
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	3,15	1,70	1,58	1,51	1,65
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	1,25	1,31	1,34	1,26	1,33

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
3. Industri Pengolahan	0,45	0,45	0,41	0,37	0,38
a. Industri Migas	3,42	3,25	2,74	2,60	2,85
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	6,11	5,90	5,01	4,81	5,32
b. Industri Bukan Migas	0,17	0,20	0,21	0,20	0,20
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,37	0,41	0,47	0,46	0,50
a. Listrik	0,55	0,65	0,74	0,70	0,75
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,12	0,13	0,15	0,14	0,18
5. Konstruksi	1,01	1,08	1,09	1,05	1,12
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,99	1,14	1,15	1,08	1,14
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,16	1,34	1,35	1,25	1,32
b. Hotel	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09
c. Restoran	0,24	0,27	0,28	0,28	0,31
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,80	0,80	0,78	0,73	0,77
a. Pengangkutan	1,47	1,60	1,65	1,58	1,73
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	2,96	3,26	3,45	3,36	3,67
3). Angkutan Laut	0,73	0,80	0,85	0,82	0,88
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,07
5). Angkutan Udara	0,54	0,52	0,46	0,39	0,40
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
b. Komunikasi	0,25	0,24	0,22	0,20	0,21
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,17	0,19	0,20	0,19	0,20
a. Bank	0,21	0,27	0,29	0,28	0,30
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,21	0,21	0,20	0,19	0,20
e. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9. Jasa-jasa	1,76	1,90	1,94	1,81	1,93
a. Pemerintahan Umum	3,79	4,15	4,27	4,03	4,45
b. Swasta	0,18	0,19	0,20	0,19	0,21
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,39	0,43	0,44	0,43	0,49
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,33	0,35	0,36	0,35	0,37
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Jika diamati sektor-sektor *tradable* (bisa diperdagangkan antardaerah) daerah, terlihat bahwa perekonomian daerah masih mengandalkan keunggulan komparatif di sektor-sektor primer. Sektor-sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari satu adalah sektor-sektor pertanian dan pertambangan. Di kelompok industri manufaktur, hanya industri

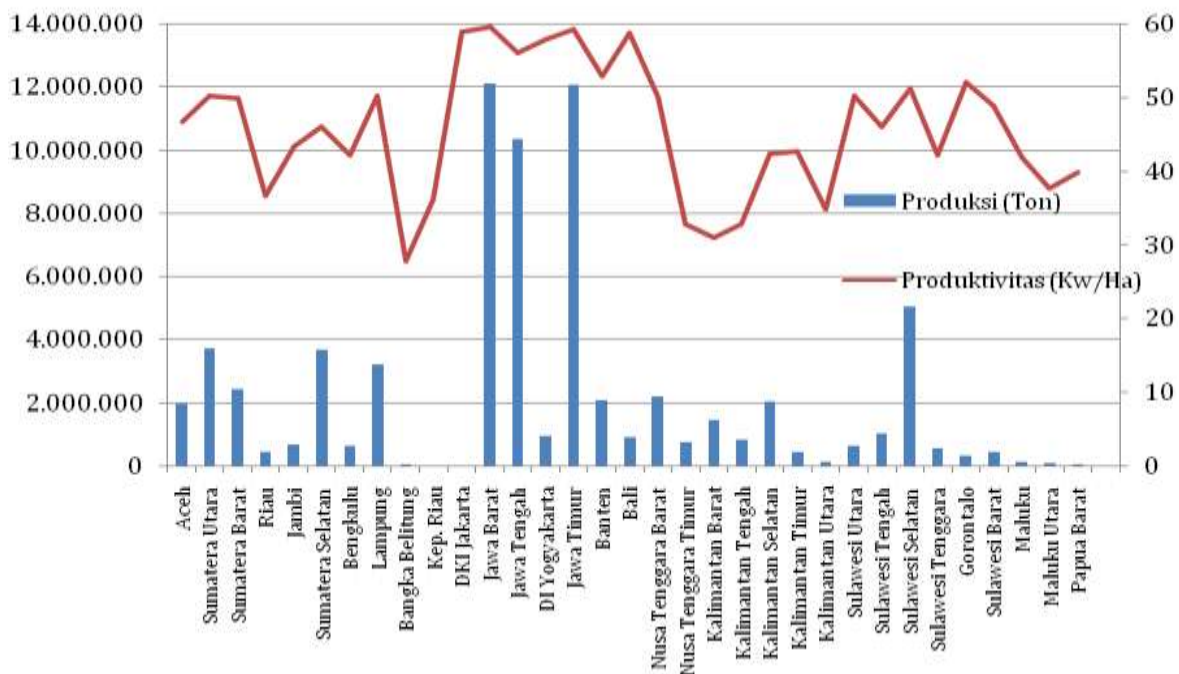
pupuk, kimia dan barang dari karet yang memiliki skor LQ lebih dari satu. Hal ini menegaskan bahwa daya saing daerah masih mengandalkan sektor-sektor tradisional.

2. Produktivitas Sektor Pertanian Masih Rendah

Salah satu peran penting Aceh bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai lumbung padi. Provinsi Aceh memiliki potensi surplus yang cukup signifikan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Total produksi padi di Aceh pada tahun 2013 mencapai 1,96 juta ton padi kering giling (Gambar 9). Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Aceh berpotensi memiliki surplus beras sebesar 558 ribu ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun.

Tingkat produktivitas padi di Aceh tahun 2013 sekitar 46,68 kwintal per hektar. Angka ini lebih rendah dari produktivitas rata-rata nasional yang mencapai 50,1 kwintal per hektar dan jauh tertinggal dari tingkat produktivitas Jawa Timur yang hampir mencapai 59,15 kwintal per hektar. Jika produktivitas daerah bisa ditingkatkan sama dengan tingkat produktivitas nasional, maka produksi padi Aceh berpotensi meningkat secara signifikan. Mengingat masih besarnya peran sektor pertanian baik dalam pembentukan nilai tambah maupun penyediaan lapangan kerja, maka peningkatan produktivitas di sektor pertanian berpotensi meningkatkan kinerja pertumbuhan daerah, kesejahteraan rakyat, dan peran daerah dalam ketahanan pangan nasional.

Gambar 9
Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013



Sumber: BPS, 2013

3. Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didorong Investasi

Dari sisi penggunaan, sumber pertumbuhan perekonomian daerah lebih didorong oleh konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, hal ini sebenarnya kurang ideal. Konsumsi meskipun menyelamatkan perekonomian domestik selama krisis global tidak bisa diandalkan sebagai mesin pendorong pertumbuhan daerah dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi akan menggerus potensi tabungan masyarakat. Pertumbuhan tinggi memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil. Oleh karena itu peran investasi dalam perekonomian perlu ditingkatkan.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Aceh secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

Tabel 5
Struktur PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	40,62	31,66
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,00	18,97
3.	Konsumsi Pemerintah	24,98	20,57
4.	PMTB	19,26	13,62
5.	Perubahan Stok	1,43	4,34
6.	Ekspor	21,30	18,97
7.	Impor	7,59	8,13
		100.0	100.0

Sumber : BPS, 2013

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Peran infrastruktur wilayah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena memfasilitasi pemusatan maupun penyebaran aktivitas ekonomi secara alami. Defisiensi infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghambat distribusi barang secara efisien, yang merupakan salah satu pilar utama daya saing wilayah. Dari sisi kuantitas, jaringan jalan di Aceh relatif cukup dengan dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 1.803 km. Kerapatan jalan di Aceh lebih tinggi dari kerapatan jalan nasional namun tertinggal jauh bila dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa (Tabel 6).

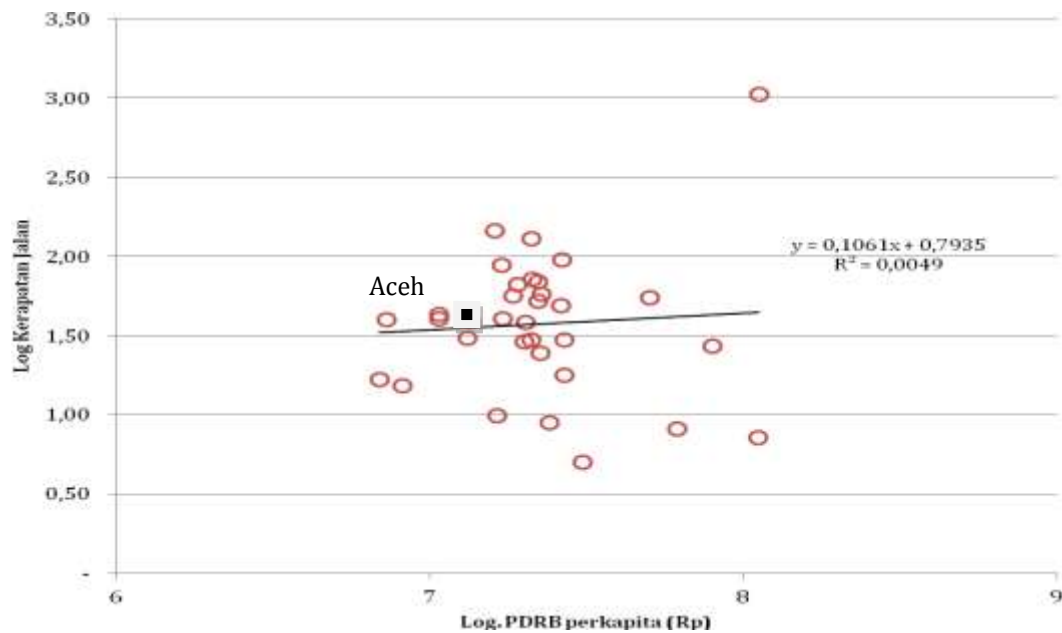
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Untuk mengetahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dilakukan dengan membandingkan kerapatan jalan antarprovinsi di Indonesia. Dari hasil regresi 33 provinsi diperoleh gambaran bahwa tingkat kerapatan jalan di Provinsi Aceh masih lebih tinggi dari rata-rata kerapatan jalan seluruh 33 provinsi di Indonesia (Gambar 10). Dengan kerapatan jalan yang relatif tinggi seharusnya perekonomian Aceh telah berkembang lebih maju dari sekarang. Tantangan yang harus dihadapi adalah optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Dari segi kualitas jaringan jalan yang ada, kenyataan menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen panjang jalan di Aceh masih belum beraspal. Hal ini menghambat kecepatan dan kelancaran pergerakan barang antardaerah. Selain itu, kurang dari separuh panjang jalan yang dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi sedang dan rusak. Kondisi jaringan jalan ini tentu mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

Tabel 7
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

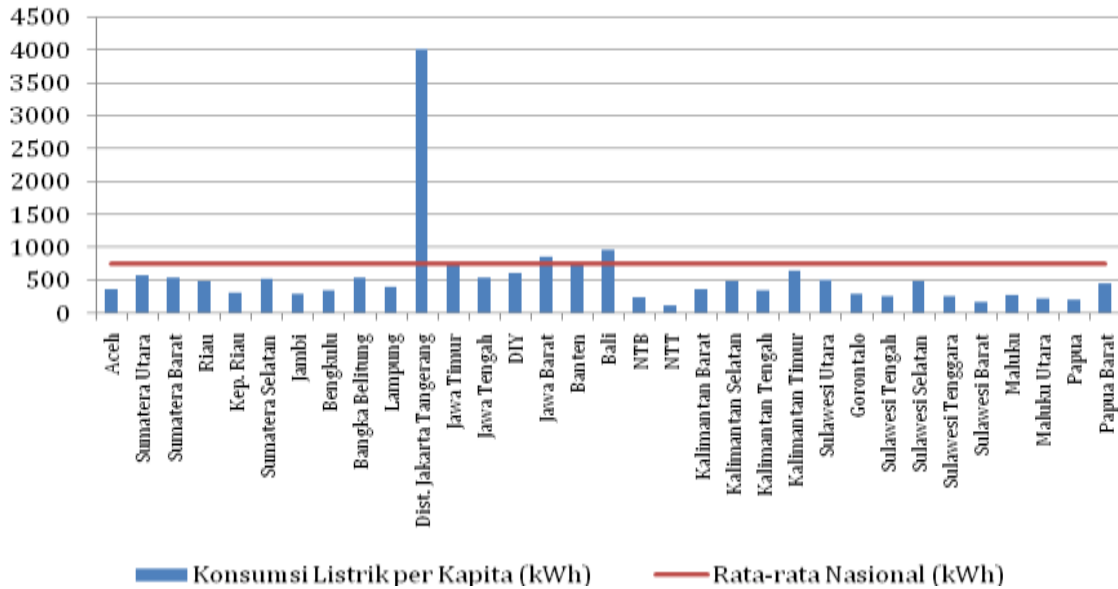
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Aceh	10.916	58	3.604	19	3.850	20	532	3	18.902	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

Isu penting berikutnya adalah dari hampir lima ribuan kilometer panjang jalan yang rusak, sebagian besar merupakan jalan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan terkait dengan keragaman kapasitas fiskal antardaerah.

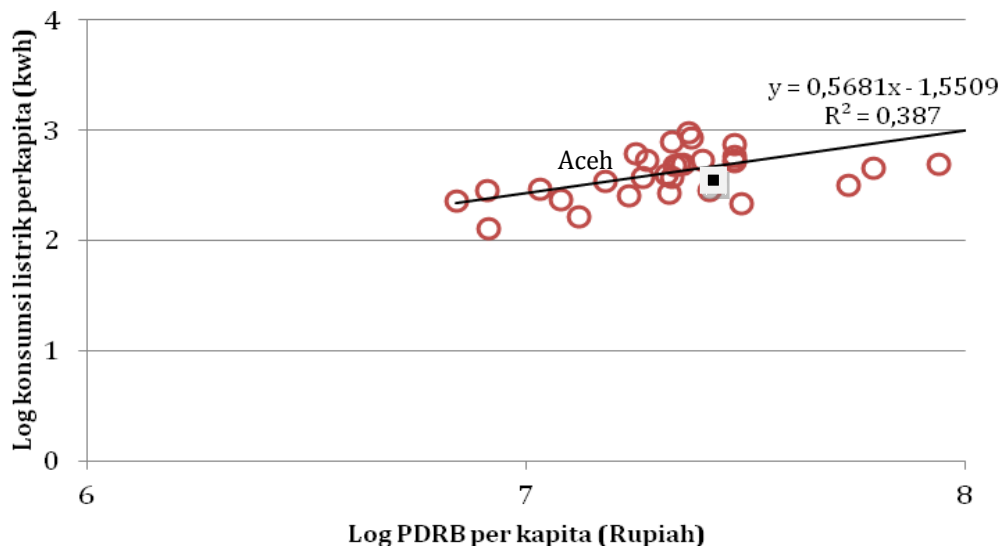
Infrastruktur penting berikutnya adalah listrik. Listrik memfasilitasi industrialisasi. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita, kondisi di Aceh relatif rendah dan di bawah angka rata-rata nasional (Gambar 11).

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



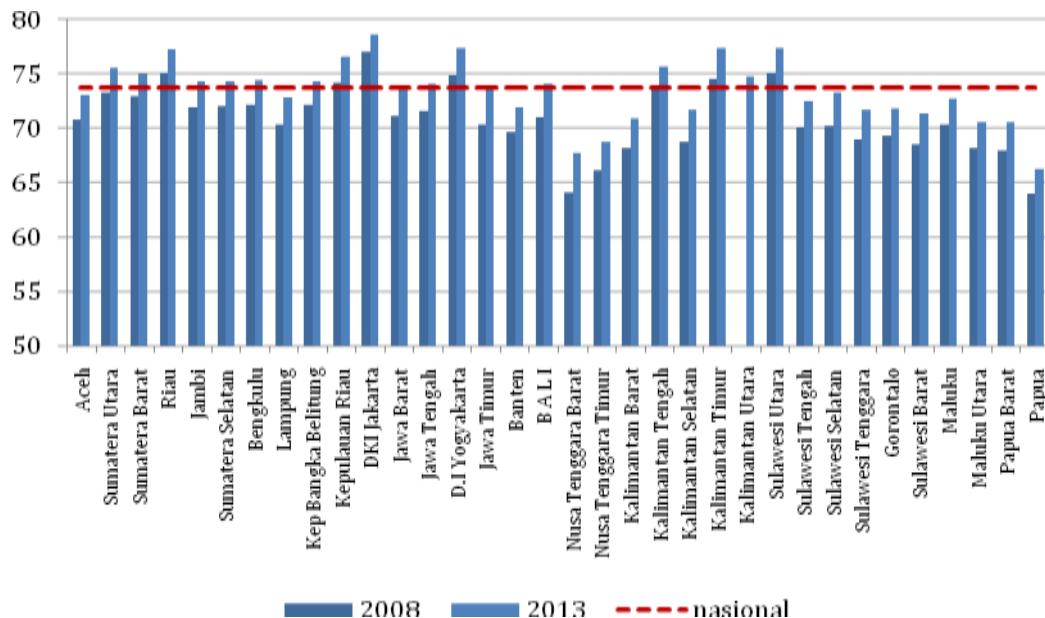
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan membandingkan data 33 provinsi di Indonesia, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Provinsi yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Dengan membandingkan konsumsi listrik perkapita antarprovinsi, konsumsi listrik di Aceh lebih rendah dibanding rata-rata 33 provinsi di Indonesia.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Aceh adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh pada tahun 2013 masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 20 dari 33 provinsi dengan nilai 73,05 (Gambar 13). Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah di Aceh adalah 9,02 tahun, meningkat dari tahun 2008 yaitu 8,5 tahun. Indikator melek huruf di Provinsi Aceh meningkat dari 96,2 persen pada tahun 2008 menjadi 97,04 persen pada tahun 2013.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013

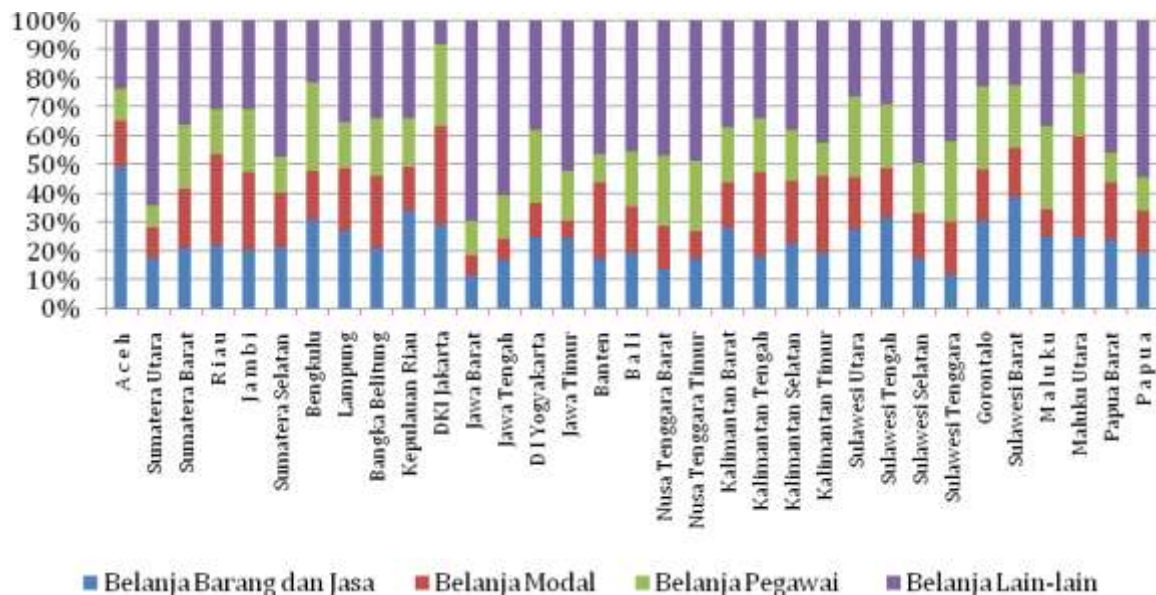


Sumber: BPS, 2013

6. Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Aceh sebesar 15,75 persen, sementara porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung besarnya 11,04 persen (Gambar 14). Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



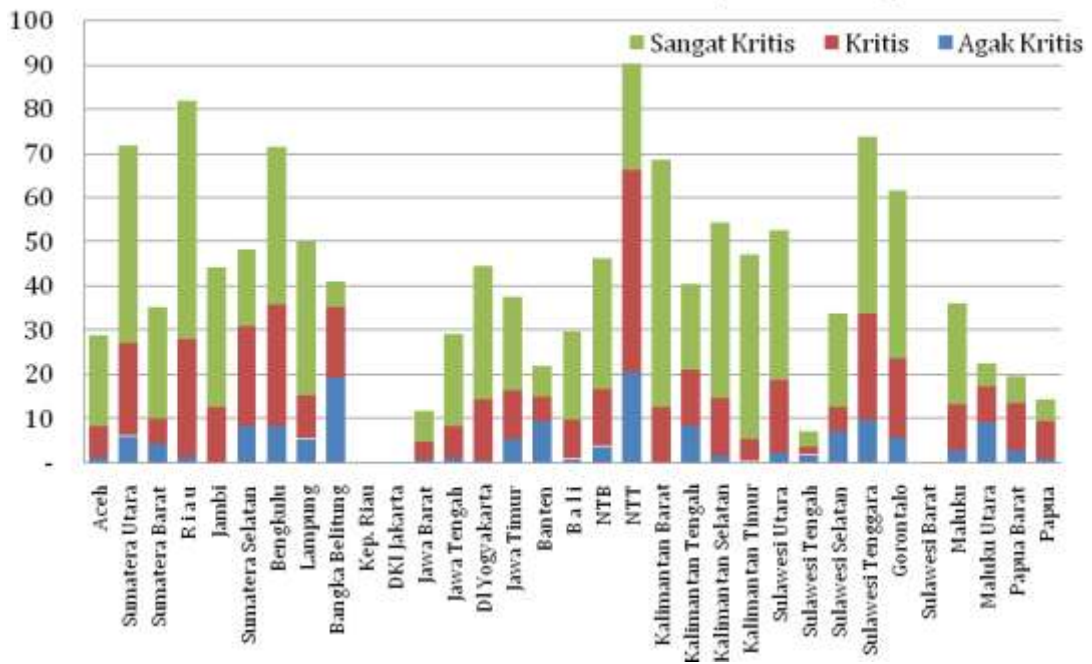
Sumber: BPS, 2013

7. Daya Dukung Lingkungan Berkurang

Pertumbuhan daerah ternyata diiringi dengan memburuknya daya dukung lingkungan. Meskipun secara nasional, tingkat kerusakan lingkungan di Aceh relatif rendah dibandingkan daerah-daerah lain, namun karakter wilayah menuntut upaya ekstra untuk mempertahankan daya dukung lingkungan. Sebagian besar wilayah Provinsi Aceh memiliki topografi berbukit dengan rentang antara daerah tertinggi di pegunungan dengan daerah pantai relatif pendek. Di samping itu perlu diingat posisi Provinsi Aceh di sepanjang lempeng tektonik sangat rawan terhadap risiko gempa bumi dan tsunami.

Luas lahan kritis pada tahun 2012 telah mencakup sekitar 30 persen luas wilayah. Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan jasa lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas yang meliputi penurunan tingkat kesuburan tanah, menurunnya keragaman hayati, meningkatnya kerentanan bencana alam, pendangkalan daerah aliran sungai, dan berkurangnya kualitas sumber daya air wilayah. Diperlukan rehabilitasi dan konservasi di sepanjang daerah aliran untuk mencegah sedimentasi berlebihan dan mengurangi risiko bencana tanah longsor dan banjir.

Gambar 14
Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah



Sumber: BPS, 2012

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Provinsi Aceh diperkirakan akan tumbuh positif di tahun 2015. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun peran investasi diperkirakan akan meningkat. Manfaat dari peningkatan kualitas infrastruktur wilayah ini diperkirakan juga akan dinikmati oleh daerah-daerah di luar wilayah ekonomi Sumatera melalui proses keterkaitan antarindustri (*linkages*). Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Aceh tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,6 – 6,2 persen dapat tercapai. Selama tahun 2014 kinerja ekonomi Aceh mengalami perbaikan. Investasi yang membaik menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja ekonomi di Pulau Sumatera. Hal ini juga didukung oleh peningkatan pembangunan

proyek pemerintah yang terus berjalan di tahun 2015. Percepatan pembangunan di Aceh perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan mengatasi berbagai permasalahan dan mengoptimalkan potensi daerah.

2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 16,2 – 11,3 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 17,6 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Aceh harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 6,3 poin persentase atau 1,05 poin persentase per tahun.
3. Peluang untuk mempercepat penurunan kemiskinan masih terbuka bila dilakukan pembenahan pada produktivitas sektor pertanian dan industri kecil padat karya, dua lapangan usaha di mana konsentrasi penduduk miskin berada. Di sisi lain, tantangan berat bagi penurunan kemiskinan daerah adalah dampak dari kenaikan harga BBM (pengurangan subsidi BBM) yang cepat atau lambat akan terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan koordinasi horisontal dan vertikal untuk mengantisipasi kemungkinan hal ini terjadi, terutama menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk memperkecil dampak yang diterima penduduk miskin dan hampir miskin.

E. Penutup

1. Isu Strategis

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu tersebut adalah permasalahan yang bila ditangani akan berdampak besar pada pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan daerah. Sebaliknya bila permasalahan tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian
- b. Pengembangan industri unggulan
- c. Peningkatan iklim investasi
- d. Pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah
- g. Pemulihan daya dukung lingkungan

2. Rekomendasi kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyuluhan pertanian dan akses petani terhadap teknologi tepat guna.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- c. Perbaikan distribusi dan akses petani pada sarana produksi pertanian.
- d. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan menyederhanakan prosedur, serta mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- e. Pengaspalan, pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- f. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- g. Peningkatan akses pelayanan kesehatan.

- h. Peningkatan pendidikan vokasional.
- i. Revitalisasi balai latihan kerja.
- j. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur daerah.
- k. Rehabilitasi lahan kritis
- l. Konservasi daerah aliran sungai dan pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan di daerah rawan bencana.